

### 3.2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ 2018

Menyikapi LKPJ Tahun 2018, DPRD Kabupaten Tegal menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah. Berikut disajikan rekomendasi dan tanggapan terhadap masing-masing poin-poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyikapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat di tahun 2018, dari 7,33% di tahun 2017 menjadi 8,45% pada tahun 2018, kedepan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab angka TPT salah satunya adalah menumbuhkan lapangan kerja baru dan memelihara/berinovasi terhadap lapangan kerja yang sudah ada untuk mengatasi jumlah pengangguran yang tinggi dimana menurut keterangan dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Jumlah Pengangguran di Kabupaten Tegal Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7.203 jiwa dari Tahun 2017 sebesar 51.000 jiwa menjadi 58.203 jiwa

#### **Tanggapan:**

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya melakukan upaya mengatasi pengangguran, salah satunya melalui kebijakan strategis penumbuhan kewirausahaan pemuda. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara holistik-berkesinambungan dengan memperhitungkan kelengkapan dan keserentakan instrumen. Instrumen fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah pelatihan dan pemagangan. Proses selanjutnya adalah pembimbingan dan pendampingan kepada pemuda sasaran program. Tidak lupa pula akan dilakukan fasilitasi kemitraan dan promosi terhadap produk usaha yang dihasilkan wirausahawan muda kita. Sebagai insentif, pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan bantuan dan akses permodalan bagi pengembangan usaha wirausahawan muda.

Sebanyak 401 gagasan bisnis diajukan oleh calon wirausaha muda. Dari jumlah itu sebanyak 100 calon wirausaha muda lolos seleksi mengikuti bimbingan teknis penyusunan rencana bisnis. Tahapan selanjutnya sebanyak 50 calon wirausaha muda mempresentasikan gagasannya di hadapan Tim Kolaborasi. Hasil akhirnya sebanyak 28 wirausaha muda mendapat fasilitas bantuan modal, inkubasi bisnis, pendampingan legalitas usaha dan pendampingan pengembangan usaha sebagai keberlanjutan program selama 2 tahun.

2. Beberapa indikator hasil pembangunan sosial menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan seperti IPM yang meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, semakin baik IPM menunjukkan bahwa semakin baik pula tingkat kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Memang benarangka IPM Kabupaten Tegal meningkat, akan tetapi angka kenaikan tersebut masih terbilang kecil dari tahun ketahun. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi jumlah/angka kematian bayi, balita dan ibu, mendorong penduduk usia 25 tahun keatas agar bias mengikuti pendidikan menengah dan tinggi. 2 (dua) hal ini perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang mana kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

**Tanggapan:**

Untuk mengurangi jumlah kematian ibu, bayi dan balita dilakukan upaya komprehensif dan holistik melibatkan semua stakeholders pembangunan. Upaya yang sudah dilakukan antara lain melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawat daruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawat daruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawat daruratan Maternal Neonatal).

Selain itu disiapkan juga fasilitas puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED.

Aspek sosial masyarakat dikuatkan, sejak dari pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Ibu Hamil (Bumil), kerjasama lintas sector (tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (toma), sekolah, SKPD lain), hingga pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (*Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng*).

3. Dari hasil analisis ketercapaian target berdasarkan indikator misi daerah sebagaimana tabel diatas, direkomendasikan agar capaian tahun yang akan datang sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2014-2019 maka, program dan kegiatan serta pendanaan APBD perubahan tahun 2019, sebagai tahun akhir RPJMD sekaligus tahun transisi pemerintahan baru pasca pilkada 2018, hendaknya RKPD Perubahan dan Anggaran perubahan tahun 2019, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja padasasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target.

**Tanggapan:**

Upaya untuk mencapai target kinerja pada tahun 2019 atau pada periode akhir RPJMD 2014-2019 dilakukan secara berkelanjutan dan teknokratik. Dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), selain didiskusikan capaian kinerja keuangan (serapan anggaran) dan *output* kegiatan (realisasi fisik) juga didiskusikan capaian kinerja hasil program (*outcome*) yang masih perlu penanganan lebih lanjut.

Dalam proses perencanaan, Perangkat Daerah telah ditingkatkan kapasitasnya sejak Kepala PD, Sekretaris, Kabag/Kabid dan Kasubag Perencanaan serta semua Kasubag/Kasi masing-masing PD untuk menyusun *casecading* (manajemen kinerja) PD. Saat ini semua PD telah mampu menyusun *casecading* dan memahami pohon kinerja Kepala PD, Kabag/Kabid dan Kasubag/Kasubid. Kinerja Kasubag/Kasubid berorientasi *output*, yang mendukung pencapaian kinerja *outcome* Kabag/kabid dan berkontribusi menunjang pencapaian kinerja *intermediate outcome/benefit* Kepala PD dan berdampak pada kinerja *benefit* dan *impact* Kepala Daerah.

4. Dalam rangka mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, patut diapresiasi atas kecenderungan dari PNS dalam mentaati ketentuan jam kerja dinas yang semakin membaik, untuk itu kebijakan seperti pemberlakuan presensi elektronik dan juga pemberian sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan jam kerja agar terus dipertahankan dan lebih disempurnakan.

**Tanggapan:**

Kebijakan peningkatan disiplin ASN terus dilakukan dan disempurnakan. Presensi elektronik sebagai bahan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terus disempurnakan. Mendasari Perbup No. 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tegal, Penyempurnaan skema TPP antara lain tidak hanya memasukkan instrumen presensi, tetapi juga komponen Capaian Sasaran Kerja Bulanan dengan bobot 60% dan Perilaku Kerja dengan bobot 40%.

Sebagai apresiasi kepada PNS yang berprestasi, memiliki kompetensi dan integritas, dilakukan Seleksi PNS Teladan, masing-masing 3 (tiga) Teladan untuk Golongan III dan 3 (tiga) Teladan untuk Golongan II.

5. Untuk sasaran meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, selamat atas dapat dipertahankannya opini WTP oleh BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Tegal masih menghadapi problem penataan aset daerah. Untuk itu agar terus dilakukan penataan aset daerah, melalui tindakan perbaikan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah serta pengawasan inspektorat yang ketat bagi seluruh OPD. dengan bimbingan BPKP dan BPK sehingga penataan aset dari tahun ketahun lebih baik lagi, sehingga opini WTP dapat dipertahankan pada setiap tahunnya.

**Tanggapan:**

Pembinaan dan pengelolaan aset dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Dari 11 item pengelolaan BMD tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah/negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset daerah.

6. Dalam pembangunan administrasi kependudukan diharapkan pemerintah daerah terus menyempurnakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya pencatatan akta kematian yang masih rendah oleh karena minat masyarakat untuk mencatatkan kematian keluarganya yang kurang. Untuk itu pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya

data kependudukan kelahiran dan kematian, perlu juga diinisiasi kemudahan-kemudahan dan insentif agar masyarakat dapat termotivasi untuk mencatatkan diri dan keluarganya demi tertibnya administrasi kependudukan daerah.

**Tanggapan:**

Pelayanan Catatan Sipil adalah memberikan layanan kepada Penduduk untuk mendapatkan akta Catatan Sipil. Untuk mewujudkan layanan tersebut dilaksanakan oleh aparat dinas Dukcapil dibidang pelayanan pencatatan Sipil dan koordinasi dengan instansi yang terkait. Upaya peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP). SIREP didesain sebagai bentuk registrasi penduduk yang melibatkan multi pihak, diantaranya pelaporan peristiwa kependudukan dan catatan sipil oleh desa. Melalui SIREP, sejak tahun 2019 dapat diketahui capaian kinerja pelayanan akta kematian yang sebelumnya selalu 0. Capaian kinerja pelayanan akta kematian sebesar 66,48% pada tahun 2019, meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya yang tidak tercatat (Not Available).

7. Untuk sasaran peningkatan kualitas pelayanan urusan pendidikan, khususnya dalam peningkatan program pendidikan anak usia dini, pemerintah daerah hendaknya terus melakukan pendataan anak-anak usia PAUD yang *update* setiap tahunnya; mendorong dan memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD dan memperbesar bantuan sarana dan prasarana PAUD yang selama ini kurang memadai, serta melakukan pembinaan melalui akreditasi yang memadai terhadap lembaga-lembaga PAUD yang dilaksanakan oleh Masyarakat agar mutunya terstandarisasi.

**Tanggapan:**

Pengembangan dan pembinaan PAUD menjadi salah satu fokus layanan wajib Pemerintah Daerah. Saat ini boleh disebutkan rata-rata setiap desa memiliki minimal 1 desa 1 PAUD. Pembinaan dilakukan agar masing-masing PAUD yang ada memiliki standar mutu yang sama-sama baik. Pembinaan juga dilakukan agar masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan PAUD sehingga Angka Partisipasi PAUD dapat meningkat setiap tahunnya.

Pembinaan terhadap PAUD telah dilakukan secara menyeluruh meliputi pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pembinaan terhadap manajemen lembaga PAUD (perizinan, akreditasi, kurikulum) hingga

pembinaan terhadap sarana dan prasarana PAUD (gedung, Alat Permainan Edukasi/APE).

8. Dalam upaya meningkatnya kualitas layanan kesehatan, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan utamanya untuk sasaran Kesehatan Ibu dan Anak serta lansia, sehingga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Anak dan Balita dapat terus ditekan sampai mendekati 0%. Hal ini untuk mewujudkan komitmen SDGs (*Sustainable Development Goals*) bahwa sampai tahun 2030, negaramenjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

**Tanggapan:**

Komitmen terhadap pelaksanaan Sustainable Development Goal (SDGs) dalam pembangunan diwujudkan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan isu-isu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Komitmen pemerintah daerah ditunjukkan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat melalui intervensi pangan dan gizi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang pro pertumbuhan (*pro growth*), pro kemiskinan (*pro poor*), serta pro investasi dan tenaga kerja (*pro job*).

Isu Kesehatan Ibu dan Anak telah mendapat porsi yang cukup baik dalam kebijakan, program dan kegiatan. Untuk isu Lansia telah dilakukan melalui pembinaan kepada Komda Lansia, Posyandu Lansia hingga Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tersebar hingga RT dan RW.

9. Capaian kinerja berdasarkan aspek pembangunan daerah pada periode 2017-2018 nampaknya mengalami perbaikan, tahun 2017 capaian kinerja berdasarkan aspek pembangunan sebesar 63% yang memenuhi/melampaui target, sedangkan tahun 2018 capaiannya sebesar 73%. Untuk itu direkomendasikan agar pada tahun mendatang terus dilakukan percepatan kinerja pada tiap-tiap aspek pembangunan yang capaian indikator kinerjanya masih dibawah target, dengan dukungan kebijakan anggaran yang memadai dan perbaikan manajemen program yang lebih efektif, agar prestasi kinerja pemerintah daerah kabupaten Tegal berdasarkan 3 aspek pembangunan tahun 2019 lebih membanggakan.

**Tanggapan:**

Percepatan pencapaian kinerja pembangunan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, tidak hanya semata-mata sebagai pelaksanaan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah untuk mampu menyusun perencanaan berbasis kinerja *outcome* melalui *casecading* kinerja.

Perencanaan dan penganggaran kinerja didesain dalam pola “1 Bidang/Eselon III 1 Program.” Melalui pola ini, penganggaran setiap bidang berada dalam 1 Program sehingga jelas ukuran keberhasilannya, terukur pula efektif dan efisiensinya. Pola sebelumnya di mana anggaran suatu bidang yang tersebar dibanyak program cenderung sulit diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja *outcome* program dimaksud.